

INTENSIFIKASI PERTANIAN TANAMAN PADI DALAM RANGKA SWASEMBADA BERAS PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 1969 – 1984

Nurvianto

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: Chipink_ponk@yahoo.co.id

Agus Trilaksana

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Penduduk Indonesia sebagian besar makanan pokoknya adalah nasi, hal ini menyebabkan kebutuhan beras nasional pun tinggi sehingga peningkatan produktifitas padi perlu. Pada April tahun 1969 pemerintah Indonesia menggalakan program intensifikasi tanaman padi untuk mewujudkan swasembada beras. Jawa Timur dinilai sebagai penyumbang produksi beras terbesar ke dua nasional. Masalah dalam penelitian yaitu :1. Apa yang melatar belakangi dilaksanakannya intensifikasi pertanian tanaman padi di Jawa Timur; 2. Bagaimana pelaksanaan program intensifikasi pertanian tanaman padi di Jawa Timur tahun 1969-1984; 3. Bagaimana dampak intensifikasi pertanian di Jawa Timur tahun 1969-1984. Tujuan penulisan adalah untuk menjelaskan latar belakang dilaksanakannya intensifikasi pertanian di Jawa Timur, untuk mendeskripsikan pelaksanaan intensifikasi pertanian tanaman padi di Jawa Timur tahun 1969-1984 dan untuk menganalisis dampak intensifikasi padi terhadap swasembada beras di Jawa Timur tahun 1969-1984. Metode yang digunakan adalah metode penulisan sejarah meliputi heuristics; mengumpulkan sumber – sumber sejarah primer dan sekunder yang berhubungan dengan topic kajian, kritik; pengujian terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan terkait kesahihan sumber, interpretasi; menghubungkan keterkaitan antar fakta dari beberapa sumber yang diperoleh dan kemudian melakukan penafsiran, historiografi; rekonstruksi berdasarkan fakta dari sumber yang diteliti dalam bentuk cerita kronologis Hasil penelitian meliputi : Faktor yang melatar belakangi intensifikasi pertanian adalah kurangnya produksi padi nasional. Pelaksanaan intensifikasi pertanian terdapat kendala yaitu kinerja petugas Bulog buruk, penyaluran pupuk yang masih banyak penyelewengan ditingkat distributor. Jawa Timur penyumbang terbesar produksi tanaman pangan yaitu mencapai 40 % skala nasional sehingga target swasembada beras pun terwujud pada tahun 1984.

Kata kunci : Intensifikasi, Pertanian, Swasembada beras, Jawa Timur

Abstract

National economic development towards industrialization era really need the role of Indonesian workers who have the competitiveness and high productivity. Education is key in creating a workforce that is more productive Indonesia. Government seeks to improve public education through 9-year compulsory education program. The problem in this study were (1) what background the government announced a 9-year compulsory education, (2) how the results of the implementation of the 9-year compulsory education up to the thoroughness based on the achievement of school children's participation. Methods of historical research through a descriptive approach consists of several steps, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Quality of public education in order to the industrialization of competition can be enhanced through the 9-year compulsory education program. Indicators of achievement can be seen through the APK SD / MI reached 115.51% and SMP / MTs reached 98.11% in 2008, so the otherwise completed in accordance with the criteria for Plenary Completed.

Keywords: Compulsory Education, Productivity, Gross Enrolment Ratio (GER)

A. Pendahuluan

Arah dan pola pembangunan ekonomi pada masa Soeharto dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang sudah dilaksanakan sampai dengan Pelita VII (sampai tahun

1996).¹ Swasembada menjadi fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Selain kebijakan intensifikasi pertanian, pemerintah Soeharto

¹ Direktorat Publikasi Departemen Penerangan RI. 1980. *Usaha menuju swasembada beras.*

juga mengintensifkan fungsi dari KUD untuk memudahkan para petani menjual hasil panennya, hal ini diatur dalam Inpres Nomor 4 tahun 1973, yang mengubah fungsi BUUD yang semula hanya dilibatkan dalam program Bimbingan Massal (Bimas), kemudian didorong menjadi KUD dengan tugas yang makin meluas.² Keberadaan KUD yang berfungsi secara baik memberi peranan dalam usaha pasca panen. KUD menampung semua hasil panen padi dari para petani, kemudian menyalurkannya ke BULOG untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia. KUD juga berperan dalam menjaga stabilnya harga ditingkat petani agar tidak terlalu rendah dan tetap stabil dalam standar harga yang diberikan oleh pemerintah. Pelaksanaan intensifikasi ini dapat dikatakan berhasil, indikatornya adalah pada tahun 1984, [Indonesia](#) mengubah status dari bangsa [pengimpor](#) beras terbesar menjadi bangsa yang dapat memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. [Indonesia](#) menerima penghargaan dari organisasi pangan dan pertanian PBB yaitu FAO (*Food Agricultural Organization*).

Keberhasilan program swasembada beras pada waktu itu, tidak terlepas dari peran provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu penyumbang stok beras terbesar nasional. Wilayah Jawa Timur sendiri pada tahun 1968, berdasarkan data yang diperoleh dari sumber yang diterbitkan oleh Direktorat publikasi Departemen Penerangan RI, Jawa Timur mampu memproduksi 4.075.000 ton dan meningkat menjadi 4.922.000 ton tahun 1973 dan 5.525.000 ton pada tahun berikutnya. Berdasarkan data Ditjen Tanaman pangan, Intensifikasi Pertanian Daerah Jawa Timur, Tahun 1985. Halaman 11. pada tahun 1984 meningkat menjadi 7.594.000 ton gkg serta 7.751.000 ton pada tahun 1988. Jumlah tersebut adalah jumlah terbesar ke dua setelah Jawa Barat dalam statistik provinsi penyumbang produksi beras nasional.

Keberhasilan program intensifikasi dalam meningkatkan produksi padi dan status sebagai salah satu penyumbang stok beras terbesar nasional, membuat penulis tertarik menjadikan provinsi Jawa Timur sebagai objek studi kasus karya tulis ini, selain itu dari beberapa buku yang peneliti baca belum ada yang memberikan data secara spesifik tentang program swasembada beras pemerintah Jawa Timur, diantaranya : Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (Ricklef, M.C. 2008). Buku ini menjelaskan tentang produksi beras nasional sebelum program intensifikasi digalakan. Soeharto: Maafkan Saya (Jun, Wang Xiang. 2008). Berisi tentang latar belakang Presiden Soeharto melaksanakan program swasembada beras. Pangan Dalam Orde Baru (Bustanul, Arifin. 1993). Beberapa alasan tersebutlah penulis bertujuan menjelaskan, mendiskripsikan serta menganalisis pelaksanaan intensifikasi tanaman padi di Jawa Timur.

Oleh karena itu penulis tertarik menulis tentang **“Intensifikasi Pertanian Tanaman Padi dalam Rangka Swasembada Beras Provinsi Jawa Timur Tahun 1969 -1984”**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari beberapa tahapan penulisan. Langkah pertama adalah heuristik yang merupakan tahapan pertama dalam penulisan dengan mengumpulkan sumber – sumber sejarah yang diperlukan sesuai dengan topic yang akan dibahas, antara lain : Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 1984. *Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Buku I Seri A, B, C, D1, D2, D3*. Direktorat Publikasi Departemen Penerangan RI. 1980. *Usaha menuju swasembada beras*. Ditjen Tanaman pangan. 1985.

Langkah selanjutnya yaitu kritik, merupakan tahapan yang berupa pengujian terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan, tujuannya adalah untuk menentukan sah atau tidaknya isi dan sumber data yang sedang diteliti. Setelah itu penulis melakukan interpretasi yaitu penafsiran terhadap fakta dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian³. Hasil. Langkah terakhir adalah historiografi merupakan tahapan penyusunan tulisan.

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Latar Belakang dilaksanakannya Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur

Pembangunan nasional Indonesia pada awal lahirnya orde baru, selalu menitik beratkan pada sektor pertanian. Indonesia memiliki sebuah model tersendiri dalam melakukan pembangunan pertaniannya tanpa meniru negara lain. Kita menggunakan sebuah model yang sederhana yaitu dengan mencanangkan suatu program yang disebut intensifikasi pertanian. Hakekat dari program intensifikasi ini adalah memaksimalkan produktifitas lahan pertanian yang ada agar memperoleh hasil yang lebih besar dengan menerapkan panca usaha tani. Panca usaha tani sendiri merupakan usaha peningkatan produksi padi dengan menggunakan 5 teknik pengolahan tanaman pertanian yang terdiri dari, pengolahan lahan pertanian dengan menggunakan alat pertanian yang lebih modern. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan hasil dari pengolahan tanah itu sendiri. pengolahan tanah yang semula dilakukan secara manual, dengan dicangkul atau menggunakan hewan ternak seperti sapi dan kerbau, mulai diperkenalkan pengolahan tanah dengan menggunakan traktor.

Penggunaan varietas unggul dalam pembenihan produk pertanian juga digalakan demi menghasilkan tanaman yang memiliki kualitas baik dalam hal pertumbuhan, yaitu tahan terhadap penyakit dan hasil produktifitasnya tinggi. Penerapan teknik pengairan yang baik yaitu dengan menambah daerah penampungan air untuk kepentingan irigasi areal persawahan. Penggunaan pupuk pertanian dalam jumlah besar juga dilaksanakan.

² Kartasasmita, Ginanjar. Pak Ibnu: Pejuang koperasi

³ Ibid.,

Hal ini difungsikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman padi untuk bisa tumbuh dan berproduksi secara maksimal. Obat-obatan kimia juga digunakan untuk mengendalikan populasi hama yang biasa menyerang tanaman padi. Hal ini dimungkinkan untuk mengurangi kerusakan tanaman akibat serangan hama.

Pada tahun 1959 sebetulnya program swasembada beras sudah digalakan oleh presiden Soekarno. Hanya saja program swasembada beras pada saat itu bisa dikatakan gagal untuk memenuhi target produksi beras untuk konsumsi dalam negeri. Program padi sentra mengawasi usaha pemerintah untuk lepas dari krisis pangan. Sampai tahun 1962, Denmas 1963 - 1964, serta Bimas tetap saja tidak berhasil meningkatkan produksi padi nasional.⁴ Pada kisaran tahun 1962 sampai tahun 1966 produksi beras nasional hanya menghasilkan rata-rata 8 juta ton pertahun. Setelah tercapai tingkat produksi sebesar 8,7 juta ton beras pada tahun 1962, produksi tahun berikutnya turun sebesar 0,9 juta ton.⁵ Itu jauh lebih baik daripada kisaran tahun 1948 - 1956 dimana produksi padi sebesar 6 juta ton. Jumlah produksi yang tidak stabil dan sedemikian minim sementara pertumbuhan penduduk meningkat tajam, membuat Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri yang sebagian besar masyarakatnya menjadikan beras sebagai makanan pokoknya. Pemerintah orde lama kemudian mengambil kebijakan impor beras untuk memenuhi konsumsi beras nasional. Meskipun ditambah dengan impor beras dalam jumlah besar sekitar 824.600 ton masih belum mencukupi kebutuhan karbohidrat masyarakat Indonesia. Krisis beras juga terjadi pada akhir tahun 1965, sehingga hal itu memaksa pemerintah mengimpor beras sebanyak 40.000 ton dari Thailand dan Birma (Myanmar).⁶ Hal itu menunjukkan bahwa pada saat itu Indonesia benar - benar tidak mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

Besarnya tuntutan untuk meningkatkan produksi beras nasional membuat pemerintah pusat mengintruksikan pelaksanaan intensifikasi pertanian kepada pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Para pejabat daerah mendapat tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan intensifikasi di daerah masing-masing dengan melaporkan langsung perkembangan pelaksanaan intensifikasi kepada presiden. Berdasarkan perintah dari pemerintah pusat tersebut mulailah pelaksanaan intensifikasi pertanian di setiap provinsi Indonesia termasuk Jawa Timur. Program intensifikasi tersebut diatur dalam repelita I dan mulai dicanangkan pada tanggal 1 April 1969. Berdasarkan KEPPRES No. 11 tahun 1969 pelaksanaan bimbingan intensifikasi terhadap petani dilakukan oleh Bulog yang sebelumnya hanya memiliki kewenangan dalam hal pengadaan beras. Pada perkembangan selanjutnya, Jawa Timur menjadi wilayah paling potensial dijadikan sebagai lahan

pertanian dan menjadi penyumbang terbesar produksi padi nasional.

2. Pelaksanaan Intensifikasi

Pelaksanaan intensifikasi padi dilakukan dengan menggunakan semua lahan yang biasa digarap oleh petani yang terdiri dari lahan lama, perluasan area maupun pembukaan lahan baru. Pelaksanaan intensifikasi tanaman padi terdiri dari beberapa aspek yaitu :

1. Pengolahan tanah dan pembentukan kelompok tani

Pengolahan tanah merupakan proses paling awal bagi seorang petani sebelum melakukan penanaman bibit tanaman. Proses tersebut dilakukan untuk meningkatkan kegemburan tanah agar bibit tanaman yang ditanam kelak dapat tumbuh dengan baik. Ada beberapa tahapan dalam pengolahan tanah sebelum sawah atau ladang dapat ditanami. Sebelum tanah persawahan diolah, terlebih dahulu diberi pengairan untuk melunakkan tekstur tanah. Setelah tahap pengairan dilanjutkan dengan proses pembabatan jerami sisa panen sebelumnya. Jerami yang dibabat kemudian dibiarkan untuk nanti dibajak bersama tanah yang nantinya akan berfungsi sebagai pupuk organik bagi tanaman yang akan ditanam. Setelah proses tersebut barulah tanah persawahan dapat mulai dibajak.

Dahulu kebanyakan masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur masih menggunakan cara sederhana dalam pengolahan tanah pertanian mereka. Kebanyakan para petani mengolah sawah mereka dengan di cangkul dan membajak dengan ditarik kerbau atau sapi. Teknik mencangkul terlihat sangat tidak efisien mengingat waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Begitu juga membajak dengan bantuan bintang, waktu yang digunakan untuk membajak dengan menggunakan kerbau atau sapi masih lama. Masalah tersebut menjadi perhatian pemerintah, bahwa untuk meningkatkan hasil produksi harus dilakukan dengan cara memodernisasi teknik pengolahan sawah petani. Untuk meningkatkan efisiensi pengolahan, pemerintah menganjurkan pengolahan tanah yang semula dilakukan secara manual, dengan dicangkul atau menggunakan hewan ternak seperti sapi dan kerbau diganti dengan menggunakan traktor. Penggunaan traktor merupakan bentuk dari modernisasi dan efisiensi dalam proses pengolahan tanah yang sesuai dengan hakekat dari program intensifikasi pertanian atau revolusi hijau. Traktor yang digunakan sebagai alat bajak adalah traktor tangan. Penggunaan traktor di Jawa dimulai sejak tahun 1973. Namun penggunaannya masih sangat terbatas.

Penggunaan traktor tangan tidak mendesak tenaga kerja manusia, dapat diproduksi dalam negeri, serta pemeliharaannya mudah. Pengolahan tanah menggunakan traktor memang memiliki kelebihan daripada cara yang digunakan sebelumnya. Penggunaan traktor menjadikan kondisi tanah jauh lebih gembur sehingga cocok untuk tanaman seperti padi yang memang membutuhkan kondisi tanah gembur dan berlumpur. Pengaruh terhadap produksi sawah yang tanahnya diolah menggunakan

⁴ Anne Booth. Ekonomi Orde baru. 1979. LP3ES.

⁵ Usaha Menuju swasembada Beras. 1980. Jakarta : Direktorat Publikasi

Departemen RI.

⁶ Bustanil, Arifin. 1993. Pangan dalam Orde Baru. Jakarta : KOPINFO,

traktor terdapat kenaikan rata-rata 5-10 kwintal per ha dibandingkan pengolahan dengan menggunakan cangkul ataupun bajak ternak.

Penggunaan traktor kecil untuk wilayah Jawa Timur tahun 1973 sebanyak 47 unit traktor, jumlah itu tetap pada tahun 1975 dan bertambah pada tahun 1977 menjadi 65 unit dengan jumlah kabupaten di Jawa Timur sebanyak 33 kabupaten. Jika dilihat dari jumlah kabupaten yang ada di Jawa Timur dapat dipastikan penggunaan traktor pada tahun tersebut masih sangat minim. Sampai kisaran tahun 1977 penggunaan kerbau sebagai alat bajak sawah masih mendominasi. Baru pada tahun 1980 an traktor sudah mulai benar benar digunakan secara meluas. Pada awal perkembangannya traktor yang digunakan adalah traktor besar yang bertenaga antara 35 – 90 Hp, namun ukurannya yang besar hanya cocok digunakan pada areal sawah yang luas tidak cocok digunakan di desa yang pada umumnya sawah tiap petani tidak lebih dari 1 hektar. Traktor kecil kemudian yang menjadi pilihan untuk digunakan membajak sawah yang bertenaga hanya 4 – 9 Hp. Penggunaan traktor tidak semata – merta menghentikan penggunaan kerbau sebagai alat bajak, karena pada kenyataannya hingga tahun 2000 an masih dapat ditemui pembajak sawah dengan menggunakan kerbau.

Pada saat pelaksanaan intensifikasi tanam padi, para petani di bedakan atau dikumpulkan menjadi kelompok-kelompok tani dimana setiap kelompok tani yang sudah mampu mengelola kegiatan bersama wajib membina kelompok tani pemilik lahan yang tidak memenuhi ketentuan tata cara pelaksanaan intensifikasi khusus secara benar. Adanya kaharusan seperti itu diharapkan mampu meningkatkan kerjasama antar petani demi terwujudnya intensifikasi yang baik dan benar. Pemerintah juga tidak setengah – setengah dalam membantu para kelompok tani. Terbukti pemerintah daerah Jawa Timur juga memberikan premi kepada kelompok tani berupa pinjaman lunak melalui KUD didaerah masing-masing. Pemberian premi tersebut tercantum dalam KEPRES RI Nomor 36 Tahun 1980.

Perluasan areal tanam juga dilakukan tiap tahun selama program intensifikasi khusus ini berjalan. Semakin terlihatnya hasil positif dari program ini membuat pemerintah menginstruksikan pelaksanaan ekstensifikasi dengan membuka lahan baru yang sebelumnya tidak produktif untuk dijadikan lahan produktif penghasil padi. Wilayah Jawa Timur luas areal yang dijadikan sebagai lahan intensifikasi mencapai luas 1.562.940 ha pada tahun 1984.

Jawa Timur secara keseluruhan luas areal tanamnya tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 1982 luas areal sawah intensifikasi Jawa Timur mencapai 1.506.941 ha yang kemudian pada tahun 1983 menjadi 1.549.620 ha dan 1.562.940 ha pada tahun 1984. Kenaikan tersebut cenderung sangat minim, hal ini terkait adanya beberapa kabupaten yang mengalami penurunan areal tanamnya. Perluasan lahan pemukiman dan industri menjadi alasan utama penyebab terjadinya penurunan, hanya beberapa kabupaten seperti Lamongan, Banyuwangi, Jember, Ponorogo, Lumajang yang mengalami peningkatan luas areal sawah.

Kabupaten Jember merupakan wilayah yang areal sawahnya paling luas dengan 133.885 ha pada tahun 1984. Posisi kedua di tempati oleh kabupaten Banyuwangi dengan luas areal 127.988 ha, sementara wilayah yang memiliki areal sawah paling sempit adalah kota Surabaya dengan 6.024 ha dan Kabupaten Pamekasan dengan 16.657 ha. Pada kisaran tahun 1974 – 1979 pemerintah pusat juga menggiatkan penanaman padi pada areal tanah kering. Untuk usaha ini, pemerintah juga harus menyediakan varietas yang cocok untuk ditanam di areal ini. Usaha tersebut juga harus diikuti dengan usaha pengembangan dan pembinaan petani untuk dapat mengolah dan merawat areal tanah kering agar dapat di tanami dengan tanaman padi. Bibit padi yang digunakan biasanya padi jenis Gogo yang merupakan jenis padi yang cocok digunakan di tanah yang lebih kering dari tanah persawahan pada umumnya atau biasa disebut dengan tegalan. Pemerintah menargetkan pengolahan 500.000 ha tanah kering pada masa tanam tahun 1974/1975 untuk dijadikan lahan yang produktif, 500.000 ha itu meliputi wilayah 14 propinsi termasuk juga di dalamnya adalah wilayah Jawa Timur. Biaya yang dianggarkan oleh pemerintah dalam kegiatan ini mencapai Rp13.100.000,- untuk dana pembinaan dan bimbingan bagi para petani agar dapat dengan baik memaksimalkan lahan-lahan kering yang ada untuk dapat di tanami tanaman padi. Perluasan penggunaan tanah kering sebagai lahan penanaman padi pada tahun selanjutnya juga masih dilakukan. Sasaran yang ingin dicapai kali ini juga tetap seluas 500.000 ha areal tanah kering. Pemerintah kali ini lebih banyak menggelontorkan dana. Untuk proyek ini pemerintah menyediakan dana sebesar Rp 32.110.000,-. Separoh dari dana itu digunakan untuk biaya pembinaan.

Pulau Jawa memiliki areal tanah kering paling luas yang dijadikan sebagai lahan intensifikasi. Sebagai pembanding, Provinsi Jawa Barat pada tahun 1974 memiliki luas areal tanah kering seluas 180 ha dengan 18 unit pengembangan padi tanah kering dan terdiri dari 614 petani sebagai anggotanya. Provinsi Jawa Tengah memiliki areal tanah kering lebih sempit dengan luas 110 ha terdapat 10 unit dan 317 petani sebagai anggotanya. Luas areal tanah kering Provinsi Jawa Timur sendiri berada di urutan pertama dengan luas areal tanah kering yang ditanami mencapai 190 ha dengan 19 unit dan anggota yang jauh lebih sedikit yaitu 399 petani. Pada tahun selanjutnya Jawa timur hanya mengalami kenaikan 10 ha menjadi 200 ha untuk luas areal tanah keringnya dan 1 unit pengembangan menjadi 20 unit sementara untuk anggotanya tidak diketahui. Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan menjadi 150 ha dengan 15 unit pengembangan dan 180 orang petani. Peningkatan terjadi pada Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah unit pengembangan sebanyak 20 unit, sementara luas areal tanah kering menjadi 200 ha dengan 507 orang petani sebagai anggota.

2. Irigasi

Padi merupakan tanaman pertanian yang membutuhkan pengairan melebihi tanaman pertanian lainnya. Air digunakan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan padi, mulai dari baik daun maupun buahnya. Untuk memenuhi kebutuhan akan air, rata-rata padi membutuhkan sedikitnya 8,6 mm setiap hari.⁷ Oleh karena itu pembangunan sarana irigasi sangatlah penting untuk menunjang kebutuhan akan air bagi tanaman pertanian. Pembangunan sarana irigasi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Bhuda. Ini dibuktikan dengan adanya salah satu prasasti kerajaan Tarumanegara yang menyebutkan pembangunan sarana irigasi untuk mengairi lahan pertanian penduduk.

Mengingat pentingnya sarana irigasi untuk pertumbuhan tanaman padi pada masa intensifikasi pertanian juga digalakan pembangunan keadaan fasilitas air yang baik tetap diusahakan untuk menunjang program intensifikasi. Karena dengan terjaminnya air, akan dimungkinkan untuk pemakaian pupuk dalam dosis tinggi. Penggunaan pupuk diperlukan untuk membantu pertumbuhan tanaman serta peningkatan produksi padi.

Untuk mengatur kegiatan pengairan, pemerintah membentuk HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) untuk mengatur sarana irigasi, apabila air berada dalam batas minimum maka harus dilakukan penetapan tata tanam, pola tanam, dan jadwal giliran pemakaian air untuk setiap areal golongan.⁸ Lembaga yang dulunya bernama P3A (perkumpulan petani pemakai air) ini sudah ada sejak zaman pemerintah kolonial belanda ini meniru apa yang dilakukan oleh masyarakat bali. Masyarakat Bali mengilhami pemerintah kolonial waktu itu dalam pembuatan irigasi. Pada tahun 1920 di Jawa Timur sudah berdiri organisasi pembinaan petani pemakai air yang disebut dengan Kring Bestuur.

Namun karena adanya resesi dunia pada tahun 1930 pemerintah waktu itu menghentikan program tersebut karena tidak adanya anggaran dana untuk melakukan pembinaan para petani. Selama 50 tahun kemudian tidak ada perhatian khusus terhadap lembaga ini. Baru pada kisaran tahun 1982 pemerintah mulai menggalakan kembali lembaga ini dengan nama HIPPA. Dengan munculnya PP Republik Indonesia nomor 23, tahun 1982, pasal 20 tentang irigasi menandai digalakkannya lagi perkumpulan petani pemakai air. Pelaksanaannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah mulai dari pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya.

Sebagian besar pembangunan sistem pengairan diusahakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Pada tahun 1973 di Mojokerto dibangun bendungan Rolak Songo yang digunakan untuk mengatur debit air yang dialirkan ke sungai Porong dan Surabaya yang nantinya akan digunakan mengairi persawahan di sekitar aliran sungai – sungai tersebut. Sepanjang aliran kedua sungai dibangun pintu-pintu air kecil untuk mengalirkan air

sungai ke persawahan di desa – desa sekitarnya. Peranan DPU dalam bidang pengairan ini ternyata terus meningkat tiap tahun. Pada tahun 1974 DPU hanya mengurus 3.924.000 ha dari areal persawahan nasional. Kemudian meningkat pada tahun 1977 areal yang diairi bertambah luas menjadi 4.337.000 ribu ha dan menjadi 4.420 ribu ha pada tahun 1978. Wilayah Jawa Timur areal sawah yang mendapat sarana irigasi juga mengalami peningkatan secara signifikan tiap tahunnya. Untuk awal pelaksanaan Repelita pertama tahun 1969 luas areal persawahan yang terjamin irigasinya seluas 896.334 ha. Kemudian pada 1976 wilayah persawahan yang terjamin irigasinya meningkat sebanyak 912.150 ha dan meningkat lagi pada tahun 1984 menjadi 924.847 ha. Berikut akan disajikan data luas sawah yang terjamin pengairannya:

Tabel 1
Perkembangan Areal Sawah Jawa Timur yang Terjamin Pengairannya (ha)

Tahun	Luas Sawah
1969	896.334
1970	896.334
1971	898.402
1972	899.029
1973	889.847
1974	897.546
1975	896.074
1976	912.150
1977	914.139
1978	914.796
1979	922.028
1980	924.245
1981	926.701
1982	928.500
1983	933.288
1984	924.847
1985	930.743

Sumber : BPS Jawa Timur

Dari data di atas dapat disimpulkan pada tahun 1982 dari 1.506.941 ha areal sawah di Jawa Timur hanya 928.500 ha yang mendapat irigasi secara baik. Pada tahun 1983 dan 1984 juga terlihat bahwa tidak semua areal sawa intensifikasi mendapat sarana irigasi dengan baik, tahun 1983 dari luas areal sawah 1.549.620 ha hanya 933.288 ha yang mendapat irigasi, dan tahun 1984 dari 1.562.940 ha hanya 924.847 ha sawah yang mendapat irigasi dengan baik. Jumlah tersebut termasuk irigasi buatan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum maupun irigasi alami. Walaupun peningkatan sarana irigasi masih jauh dari jumlah areal sawah yang ada, namun itu tidak terlalu berpengaruh karena beberapa sawah menggunakan sistem tadah hujan. Selain bendungan induk irigasi yang terdapat di Jawa Timur adalah irigasi pedesaan. Irigasi ini dibangun untuk menyalurkan air dari sumber air utama menuju sawah para petani.

⁷ Effendi pasandaran, Irigasi di Indonesia, strategi dan pengembangan.

⁸ Lembaran daerah provinsi JaTim seri D3

3. Perlindungan Tanaman Melalui Penggunaan bibit unggul, Pupuk dan Pestisida

Penggunaan bibit unggul untuk mendapatkan hasil yang memuaskan sudah dilaksanakan sejak dulu. Pada saat pelaksanaan program padi sentra tahun 1963 sudah berhasil menghasilkan jenis varietas padi unggul seperti padi Bengawan, Jelita yang kemudian pada tahun 1968 muncul jenis padi PB 5 dan PB 8. Secara produktifitas varietas tersebut mampu memberikan kenaikan produksi, akan tetapi ada beberapa kelemahan yang menjadikan varietas ini tidak disukai. Padi PB terkenal dengan batangnya yang pendek sehingga menimbulkan kesulitan pada saat pemanenan. Selain itu rasa dari nasinya juga terbilang tidak enak. Selain itu serangan hama wereng coklat pada tahun 1974 mengharuskan adanya benih yang tahan terhadap hama wereng.

Benih -Varietas ini biasa disebut dengan istilah VUTW atau varietas utama tahan wereng yang merupakan terobosan pembenihan untuk menciptakan salah satu benih unggul diantaranya PB 26 dan PB 30. Selain itu penyeragaman masa tanam pada satu areal tanam dan pelaksanaan 2 kali tanam padi di selingi 1 kal tanaman palawija dalam satu tahun juga mampu menahan populasi serangan hama wereng. Pada waktu penanaman memasuki musim hujan benih yang ditanam dari jenis padi yang berumur dalam sekitar 3 bulan dari mulai menebar sampai memanen. Cara ini dilakukan karena persediaan air yang melimpah sehingga tidak perlu khawatir tanaman padi kekurangan air. Jenis padi yang akan ditanam petani dianjurkan untuk menanam benih padi seperti Cisadane dan Membramo yang dikenal memiliki tekstur beras yang pulen. Pada masa akhir musim penghujan dan musim kemarau padi berumur genjah atau pendek lebih cocok untuk ditanam untuk menghindari tanaman kekurangan air, karena padi varietas ini lebih tahan kering, varietas genjah ini salah satunya adalah IR 36. Proses penyaluran benih diatur oleh Dinas pertanian tanaman Jawa Timur selaku pihak yang bertanggung jawab pada program ini. Dalam penyaluran benih Dinas Pertanian dibantu oleh beberapa pihak seperti PT Pertani, Perum Sang Hyang, KUD dan Balai pengawasan dan sertifikasi benih.

Penggunaan benih unggul yang tahan penyakit sangat perlu mengingat pada kisaran tahun 1974 beberapa wilayah di Jawa Timur mendapat serangan hama wereng batang coklat. Wilayah yang diserang meliputi daerah-daerah yang menjadi sentra produksi padi di Jawa Timur seperti Banyuwangi, Lumajang, Jember, Malang, Sidoarjo dan Ngawi. Selain itu hama wereng juga mewabah di beberapa wilayah provinsi Jawa Barat, Bali, Sumatera Selatan dan Aceh. Perlu diketahui wereng batang coklat merupakan jenis wereng yang berbahaya. Wereng ini menghisap pangkal batang padi sehingga menjadikan batang padi menjadi busuk dan tanaman padi pun mati. Survei tahun 1973-1977 menyebutkan, serangan hama wereng mengakibatkan kerusakan lahan pertanian yang siap panen mencapai rata-rata 5 %. Hal ini mengakibatkan jumlah produksi padi mengalami penurunan. Untuk melindungi tanaman padi dari gangguan berbagai macam hama maka dibentuklah

stasiun pengamatan dan peramalan. Selain dilakukan oleh petani sendiri, di Jawa Timur didirikan stasiun untuk melakukan pengawasan dan pengamatan lahan intensifikasi dari serangan hama.

Berikut ini adalah data kerusakan lahan akibat serangan hama pada tahun 1974-1977 di wilayah Jawa Timur

Tabel 2
Luas Panen dan Kerusakan Padi di Jawa Timur Tahun 1974-1977

Tahun	Luas Panen (ha)	Kerusakan (ha)	% Kerusakan
1973	3.670.422	123.422	3,4
1974	3.824.509	65.509	1,7
1975	3.904.631	130.631	3,3
1976	4.002.915	302.915	7,6
1977	3.748.155	327.155	8,7

Sumber : Direktorat Publikasi Departemen Penereangan RI

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kerusakan yang terjadi sebelum tahun 1980 cukup besar yang berdampak terjadinya krisis pangan. Kerusakan lahan pertanian mengakibatkan jumlah produksi padi pada tahun – tahun tersebut tidak pernah mencapai target. Pada tahun 1973 kerusakan yang mencapai 3,4 % atau seluas 123.422 ha. Kerusakan yang terjadi pada tahun 1977 dengan luas kerusakan mencapai 327,155 ha atau sekitar 8,7 % dari luas areal tanam semula. Dampaknya pemerintah masih belum mampu mencukupi kebutuhan beras masyarakat yang menyebabkan banyak penduduk yang mengganti makanannya dengan roti maupun kacang hijau dan hanya makan nasi satu kali sehari. Penanggulangan bencana tersebut dilakukan dengan memberantas hama menggunakan insektisida. Untuk hama wereng insektisida cair disemprotkan ke seluruh tanaman padi yang terjangkit pada sore maupun pagi. Penyemprotan dilakukan beberapa kali hingga hama wereng benar – benar hilang semua. Selain itu penyemprotan menggunakan obat perangsang pertumbuhan tanaman juga dilakukan guna mendapatkan pertumbuhan selain menggunakan pupuk.

Tabel 3
Kebutuhan Pestisida di Jawa Timur Tahun 1978 – 1984

Musim Tanam (Kemarau dan Hujan)	Insektisida (liter)	Rodentisida (Kg)
1978	3.901.500	118.000
1979	3.542.640	183.168
1980	2.050.000	90.000
1981	2.320.716	147.928
1982	2.691.500	78.500
1983	2.650.000	76.500
1984	3.000.000	76.500

Sumber : BPS Jawa Timur 1984

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penggunaan insektisida mengalami penurunan dari tahun 1979 sebesar 3.542.640 liter menjadi 3.000.000 liter. Dari data tersebut dapat disimpulkan dari tahun ke tahun gangguan hama berkurang seiring dengan diciptakannya bibit unggul baru yang lebih tahan dengan serangan hama. Sementara itu untuk merangsang pertumbuhan tanaman yang lebih baik, para petani melakukan pemupukan tanaman padi mereka. Pupuk merupakan faktor penting guna menjaga agar pertumbuhan tanaman tetap stabil. Pemupukan tanaman dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu masa tanam. Tahap pertama diberikan saat padi berumur 10 hari setelah masa tanam. Pada saat ini padi sudah mulai tumbuh daun baru dan akarnya sudah mampu menyerap unsur hara dari tanah, Pupuk yang digunakan biasanya Tsp, Za dan organik. Kemudian tahap kedua dilakukan pada saat padi berumur 25 hari dengan menggunakan pupuk phonska an urea guna merangsang pertumbuhan yang baik. Tahap terakhir dilakukan pada saat padi berumur 40 hari saat mulai berbuah guna merangsang pertumbuhan buah. Untuk satu hektar sawah dibutuhkan masing masing 200 kg pupuk untuk mampu merangsang pertumbuhan dengan baik, hasilnya adalah produksi padi dapat ditingkatkan menjadi 1 ton per hektarnya.

Pada tahun 1973/1974 di Jawa Timur terjadi kenaikan harga pupuk yang cukup besar yaitu mencapai 50 %. Harga pupuk saat itu mencapai harga Rp. 40,- dirasa sangat memberatkan para petani. Pupuk merupakan bagian terpenting dalam peningkatan produksi padi. Kenaikan harga pupuk berarti meningkatnya biaya produksi yang harus dikeluarkan para petani. Ketergantungan akan impor lah yang menjadikan harga pupuk terus mengalami kenaikan. Pada tahun tersebut pemerintah lewat pusri masih belum mampu memenuhi secara keseluruhan kebutuhan pupuk. Sampai tahun 1980 an pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar 85 % dari keseluruhan kebutuhan pupuk bagi petani.

Tabel 4
Kebutuhan Pupuk di Jawa Timur Tahun 1978 - 1984

Musim Tanam (Kemarau dan Hujan)	Urea (Ton)	TSP (ton)
1978	416.000	124.650
1979	502.689	188.844
1980	526.767	110.000
1981	659.000	149.754
1982	740.000	160.000
1983	765.000	165.000
1984	805.000	201.000

Sumber : BPS Jawa Timur 1984

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kebutuhan pupuk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 1978 kebutuhan pupuk Urea dan TSP sebanyak 416.500 ton dan 124.650 ton. Jumlah

tersebut meningkat pada tahun 1984 menjadi 805.000 ton pupuk Urea dan 201.000 ton pupuk TSP. Hal ini disebabkan oleh luas areal sawah juga mengalami peningkatan akibat usaha ekstensifikasi. Pada tahun 1971 – 1973 kebutuhan pupuk masih jauh lebih tinggi dari produksi pupuk dalam negeri. Untuk mengatasinya pemerintah melakukan impor pupuk rata – rata 500.000 ton per tahunnya. Sementara pada tahun 1974 kebutuhan impor Indonesia sebesar 323.600 ton dan pada tahun 1980 menurun menjadi 270.000 ton.

4. Sistem pemasaran

Harga padi di tentukan oleh pemerintah untuk menjaga ke stabilan harga di pasaran. Penentuan ini disesuaikan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan petani. Dalam rangka pengendalian harga itu, pemerintah mematok harga mengikuti perkembangan moneter yang terjadi pada waktu itu. Saat itu pada tahun 1974 harga gabah kering dipatok sebesar Rp 29,40 per kg yang pada tahun 1975 naik menjadi Rp 40,60. Seiring berubahnya situasi moneter harga gabah kering kembali naik pda tahun 1976, 1977, 1979 berturut-turut menjadi Rp 57,50-, Rp 67,50 dan Rp 85 per kg. Untuk tahun 1979 harga kembali naik lagi menjadi Rp 95 per kg.

Harga tersebut diatas merupakan harga terendah dari petani, ketika BULOG membeli gabah – gabah tersebut dari KUD di desa-desa harga berubah menjadi Rp 100 per kg. Seiring dengan laju inflasi sejak tahun 1980 yang merupakan awal titik balik pertanian Indonesia harga beras melonjak menjadi Rp. 300,- per kilogram atau Rp 275,- untuk harga beli dari petani. Harga tersebut masih terbilang terjangkau mengingat pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan seiring ekonomi yang membaik. Proses pembentukan harga sesuai kebijakan pemerintah terdiri dari 2 tahap, yaitu :

1. Pembelian oleh BULOG / KUD dari petani di desa
2. Pembelian oleh BULOG dari BUUD / KUD dan non KUD

Bulog didirikan pada tanggal 10 Mei 1967 melalui Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/Kep/1967 yang kemudian diperbaharui dengan KEPPRES no 11 tahun 1969, diperbaharui lagi dengan KEPPRES no 39 tahun 1978.⁹ Bulog memiliki tugas yang vital dalam hal pemasaran hasil produksi padi. Selain sebagai pemasok beras bagi pegawai negeri dan masyarakat umum, Bulog bertugas untuk menetapkan harga dasar serta harga eceran tertinggi guna menjaga agar harga beras di pasaran tidak terlalu rendah maupun tinggi. Bulog diwajibkan melakukan operasi pasar apa bila terlihat kenaikan harga beras secara tidak wajar, akibat dari kelangkaan guna menstabilkan harga kembali. Tercatat selama periode krisis pangan tahun 1970 – 1979 Bulog secara rata – rata melakukan dropping beras guna operasi pasar sebesar 12.000 ton per bulan untuk Jawa Timur atau 150.000 ton per bulan secara nasional. Namun keadaan berbalik setelah tahun 1980, Jawa Timur saat iu

⁹ Bustanil, Arifin.1993. *Pangan dalam Orde Baru*. Jakarta : KOPINFO hal. 314

berkat keberhasilannya melakukan intensifikasi pertanian menjadi pemasok terbesar kebutuhan beras nasional.

5. Penyuluhan melalui BIMAS

Untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan para petani, selalu mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada kelompok-kelompok tani yaitu melalui Bimbingan Masal (Bimas). Bimas memiliki 2 program utama dalam pelaksanaannya, yang pertama BIMAS bertugas sebagai pembimbing petani untuk melakukan teknik pertanian yang lebih baik dan yang kedua Bimas juga menyalurkan kredit maupun subsidi dari pemerintah untuk dijadikan modal oleh para petani. Selama Pelita I pemerintah Jawa Timur sudah menggelontorkan dana yang digunakan sebagai modal kredit petani pada tahun 1971 sebesar Rp 13.224.897.000 dan pada tahun 1974 menjadi Rp 13.390.000.000, setiap tahun dana yang dikeluarkan pemerintah terkait juga dengan adanya peningkatan lahan yang dijadikan sebagai sarana Intensifikasi. Sementara untuk subsidi lebih cenderung diberikan dalam bentuk pemberian pupuk gratis ataupun murah.

Selain itu untuk merangsang minat dan keseriusan diadakan perlombaan insus dimana setiap pemenang yang mampu menghasilkan padi lebih besar dengan kualitas terbaik akan diberi hadiah.¹⁰ Di tingkat petani, dibentuk kelompok-kelompok tani yang berfungsi untuk menjalankan instruksi di lapangan. Perannya sama seperti prajurit di medan perang, yaitu petani tidak boleh mengambil keputusan soal produksi. Pemerintah akan memutuskan jenis benih apa yang akan digunakan, berapa lama waktu tanam, jenis pupuk, pestisida, dan lain-lain. Kemudian, petani tinggal melaksanakan apa yang diinstruksikan, setelah diberikan penyuluhan oleh lembaga-lembaga penyuluhan yang dibentuk oleh Departemen Pertanian. Di lapangan, lembaga-lembaga penyuluhan tersebut dibebankan tugas untuk memastikan apakah petani sudah menjalankan sesuai dengan yang diinstruksikan. Setiap penyuluh harus memastikan semua petani bimbingannya menjalankan instruksi. Perkembangan dari program insus ini menjadi tanggung jawab para Gubernur, Bupati dan walikota, sehingga pejabat tersebut harus mengawasi pelaksanaannya agar bisa sukses. Selain itu penyusunan petunjuk pelaksanaan program ini adalah kewajiban Kepala kantor wilayah departemen pertanian.

3. Dampak Terhadap Swasembada Beras Di Jawa Timur Tahun 1969 - 1984

Perencanaan penyelenggaraan program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi beras dalam negeri. Program ini menggunakan lahan pertanian diseluruh Jawa serta perluasan areal tanam di pulau – pulau lain yang belum maksimal atau masih minim digunakan sebagai lahan pertanian. Daerah tersebut diharapkan mampu mensuplai kebutuhan beras penduduk setempat

dan memenuhi stok nasional. Selama pelaksanaannya pulau Jawa menjadi wilayah penghasil terbesar stok nasional. Terlepas dari banyaknya hambatan yang dilalui dalam masa pelaksanaannya, hasil positif dapat diraih dengan secara nyata meningkatnya produktifitas padi dari tahun 1969 – 1984. Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama disusul kemudian provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Jawa Timur menjadi penyumbang atau sentra produksi padi terbesar kedua setelah Jawa Barat dengan jumlah produksinya mencapai 5,509,572 ton pada tahun 1974, kemudian mengalami penurunan pada tahun 1975 menjadi 5.376.269 ton. Produksinya mengalami kenaikan lagi pada tahun 1976 dan 1977 menjadi 5.808.125 ton dan 5.847.156 ton. Jawa Timur memang memiliki wilayah yang sangat subur oleh karena itu sangat cocok digunakan untuk lahan pertanian padi. Wilayah nya banyak gunung – gunung berapi yang terkenal memiliki tanah yang subur, selain itu terdapat banyak sungai – sungai yang mengalir sepanjang tahun sebagai penunjang sarana irigasi areal persawahan. Pulau Jawa sendiri memang terkenal memiliki tekstur tanah yang lebih subur dari pulau – pulau lainnya di Indonesia. Selain itu lahan produktif di Jawa keseluruhan digunakan sebagai lahan pertanian padi, sementara untuk wilayah lainnya merupakan perluasan lahan baru yang baru diintensifkan atau yang disebut ekstensifikasi pertanian. Karena minimnya lahan yang digunakan serta kurang suburnya tanah diluar Jawa menjadi faktor minimnya produksi padi di luar pulau Jawa. Wilayah Jawa Timur sendiri pada tahun 1968, berdasarkan data yang diperoleh dari sumber yang diterbitkan oleh Direktorat publikasi Departemen Penerangan RI, Jawa Timur mampu memproduksi 4.075.000 ton dan meningkat menjadi 4.922.000 ton tahun 1973 dan 5.525.000 ton pada tahun berikutnya. Kemudian pada tahun 1984 meningkat menjadi 7.594.000 ton gkg (gabah kering giling) serta 7.751.000 ton pada tahun 1988. Hal ini menunjukkan program intensifikasi pertanian tanaman padi secara nyata mampu meningkatkan jumlah produksi padi setiap tahunnya. Namun Indonesia sendiri mencatatkan diri sebagai negara swasembada beras baru pada tahun 1984 dengan menyabet penghargaan dari FAO. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel produksi padi Jawa Timur di bawah ini:

Tabel 5
Produksi Padi Jawa Timur
Tahun 1969 – 1984

Tahun	Hasil (ton)
1969	4.649.103
1970	4.509.424
1971	4.663.238
1972	4.692.683
1973	4.922.877
1974	5.509.572
1975	5.376.269
1976	5.808.125
1977	5.847.156
1982	7.261.842
1983	7.886.989
1984	7.710.977

Sumber : BPS Jawa Timur 1984

¹⁰ Kompas, Rabu 2 Januari 1979. Insus, Produksi padi meningkat.

Dari data di atas dapat dilihat pada saat awal Pelita I hingga akhir Pelita III tahun 1984, jumlah produksi padi terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 1969 jumlah produksi padi mencapai 4.649.103 ton. Lima tahun kemudian pada tahun 1974 jumlahnya kembali naik menjadi 5.376.269 ton padi. Jumlah itu terus meningkat hingga akhir Pelita III tahun 1984 menjadi 7.710.977 ton padi. Hasil tersebut memang dirasa cukup baik, tapi apakah kenaikan tersebut bisa dijadikan indikator tercapainya swasembada beras. Kenyataannya untuk tahun 1969 – 1982 masih sering terjadi krisis pangan yang berimbas naiknya harga beras saat itu. Hal ini dikarenakan kenaikan produksi tersebut masih belum sebanding dengan jumlah konsumsi yang dibutuhkan. Penyebab utamanya adalah jumlah penduduk yang jauh lebih pesat perkembangannya. Kegagalan panen karena kekeringan serta serangan hama menjadikan produksi padi kurang dari target yang ditetapkan.

Krisis terjadi pada periode tahun 1972/1973 dimana saat itu terjadi kemarau panjang. Kondisi tersebut bukan hanya dialami oleh Indonesia saja, krisis beras juga melanda seluruh Asia. Bangsa Asia yang memang sebagian besar penduduknya menjadikan nasi sebagai makanan pokoknya tentu sangat dipusingkan dengan keadaan tersebut.

Tahun 1969 dan 1970 walaupun tertimpa krisis pangan, Indonesia masih bisa menambal kekurangan dengan cara impor. Akan tetapi karena tahun 1973 beras dari luar negeri juga terbatas. Birma, Thailand yang biasa menjadi pemasok beras Indonesia persediaannya juga terbatas. Untungnya Thailand waktu itu masih bisa menyediakan beras untuk Indonesia sebesar 50.000 ton dengan harga yang melambung jauh yaitu sekitar US\$ 500 per ton saat itu. Impor tersebut ditujukan untuk menambah buffer stock yang dimiliki oleh Indonesia saat itu sebesar 300.000 ton saja. Jumlah tersebut dirasa kurang untuk dilakukannya operasi pasar dalam rangka menstabilkan kembali harga beras di pasar.

Sepanjang tahun saat itu bisa dikatakan selalu terjadi krisis, tahun 1977 jauh lebih parah yang mengakibatkan pemerintah harus sering melakukan operasi pasar guna memenuhi kebutuhan pasar dan menstabilkan kembali harga beras. Pada bulan September – Oktober, Bulog melakukan beberapa kali operasi pasar guna memenuhi kelangkaan beras dan menstabilkan harga beras. Bulog sebagai pengemban tugas tersebut mensuplai beras sebanyak 1.900 – 4000 ton untuk wilayah Jawa Timur, sementara total untuk seluruh Indonesia Bulog mengeluarkan 2 juta ton beras untuk operasi pasar selama satu tahun. Jumlah tersebut adalah yang terbesar yang dikeluarkan oleh Bulog selama menangani krisis beras dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu kondisi tahun 1977 memang sangat mengkhawatirkan.

Baru pada tahun 1979 penduduk Jawa Timur bisa bernapas lega karena stok beras sudah mulai menunjukkan adanya surplus. Kali ini produksi beras mampu melampaui perkembangan penduduk. Berdasarkan koran Kompas pada tahun 1979 produksi padi mengalami peningkatan. Intensifikasi berhasil meningkatkan rata – rata produksi dari 46 kwintal per

hektar menjadi 60 kwintal per hektar. Pada saat itu petani dirangsang untuk menggalakan program intensifikasi dengan diadakannya lomba intensifikasi pertanian. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok tani di seluruh Indonesia, pemenang ditentukan oleh keberhasilan mereka dalam meningkatkan hasil produksi serta tata cara pelaksanaan intensifikasi yang baik dan benar.

Untuk pemenang akan mendapatkan hadiah dari Presiden Soeharto bagi tingkat tiap provinsi. Untuk wilayah Jawa Timur disediakan 20 ekor sapi bagi pemenang lomba tersebut. Dampaknya produksi padi mulai meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1982 produksi padi Jawa Timur sebesar 7.261.842 ton dan berkembang menjadi 7.886.989 ton pada tahun 1983. Kemudian pada tahun 1984 produksi padi Jawa Timur sebesar 7.710.977 ton dari target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 8.050.000 ton padi. Walaupun tidak sesuai dengan target awal dan mengalami penurunan produksi dari tahun sebelumnya tidak mempengaruhi pasokan beras kepada masyarakat. Bahkan pada tahun tersebut Indonesia terdaftar sebagai negara swasembada beras. Semua itu dikarenakan stok dari tahun 1983 melimpah ruah sehingga menambah stok dari hasil tahun 1984. Beberapa kabupaten di Jawa Timur juga mengalami surplus beras yang jauh melebihi target.

Propinsi Jawa Timur terdiri dari 30 kabupaten penghasil beras termasuk daerah di Pulau Madura. Dari data di atas dapat dilihat bahwa untuk kabupaten Jember adalah penghasil padi terbesar dengan 720.642 ton gabah kering. Kemudian Banyuwangi dan Lamongan menempati posisi kedua dan ketiga dengan produksi masing – masing 690.805 ton dan 437.502 ton gabah kering. Tahun – tahun sebelumnya ketiga kabupaten ini selalu menjadi kabupaten dengan hasil produksi padi terbanyak di Jawa Timur (lihat tabel). Pada 6 Maret tahun 1983 Jawa Pos menyebutkan pemerintah provinsi Jawa Timur mengeluarkan biaya sebesar 15, 5 Milyar guna melakukan pengadaan beras untuk memenuhi stok gudang Bulog. Pemerintah membeli 500.000 ton padi dari petani yang mengalami surplus produksi padi saat itu yang akan digunakan sebagai stok penyangga untuk melakukan operasi pasar jika dibutuhkan kelak. Pembelian tersebut memang sudah diatur dalam undang-undang sebagai tugas bulog yang harus dilakukan demi menjaga harga beras agar tetap stabil dipasaran. Pembelian itu juga merupakan prosedur pelaksanaan Intensifikasi dalam hal pemasaran. Tujuannya ialah agar petani tidak terjebak oleh permainan tengkulak yang bisa seenaknya memaminkan harga padi.

Melalui Jawa Pos bupati Bangkalan menyatakan wilayahnya sudah mulai merasakan kenaikan produksi padi sejak tahun 1980. Hingga tahun 1983 kabupaten bangkalan mengalami kenaikan padi sebanyak 23 %. Hal itu dikarenakan keberhasilan dalam pelaksanaan program Intensifikasi Khusus tanaman padi yang digalakan pemerintah. Sementara berita harian dalam koran hari Jumat, 5 Oktober 1984 menyebutkan dalam judul “ Pengadaan pangan lancar, tak ada tunggakan” menyebutkan adanya surplus beras yang melebihi target dalam tahun tersebut untuk daerah Bondowoso dan Situbondo. Stok yang dimiliki Bulog saat sebesar

43.308 ton beras untuk Bondowoso dan 20.145 ton stok beras yang dimiliki oleh Bulog Situbondo dari. Harga beras di pasaran pun relatif stabil, bahkan Bondowoso yang menjadi pemasok beras untuk kebutuhan wilayah luar kota dan luar pulau membangun lagi gudang penyimpanan berkapasitas 3.500 ton di daerah Asam Bagus. Sementara untuk wilayah Magetan pada tahun 1984 juga mengalami surplus beras, produksi mengalami kenaikan sebesar 3 – 4 % dari tahun sebelumnya. Usaha perluasan areal tanam juga melebihi target, dari target awal seluas 34.800 hektar menjadi 36.528 hektar. Sementara untuk hasil produksinya sebesar 187.444 ton gabah kering. Secara keseluruhan pada tahun 1984 wilayah Jawa Timur sudah mengalami swasembada beras hasil dari penggalakan Intensifikasi Pertanian.

C. Penutup

A. Simpulan

Secara umum faktor yang melatar belakangi pemerintah melaksanakan intensifikasi pertanian adalah kurangnya produksi padi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk. Penduduk Indonesia yang mayoritas penduduknya mengkonsumsi beras, membuat pemerintah harus menyediakan beras dalam jumlah yang besar dengan jalan impor karena Indonesia memiliki penduduk besar dengan laju perkembangannya cepat pula. Selain itu wilayah Indonesia, khususnya pulau Jawa memiliki tanah yang subur. Jawa Timur yang menjadi fokus dalam pokok bahasan ini merupakan wilayah pertanian paling potensial di Indonesia. Wilayah ini menyumbang 40 % hasil pertanian seluruh Indonesia. Dengan potensi seperti itu menjadikan sebagian besar penduduk Jawa Timur bekerja sebagai petani. Melihat realita bahwa Indonesia adalah negara agraris membuat pemerintah bertekad untuk memaksimalkan potensi tersebut guna mencapai Indonesia yang makmur. Sementara itu, dalam pelaksanaannya intensifikasi pertanian sudah berjalan dengan baik. Walaupun ada beberapa kendala mulai dari penyaluran pupuk yang masih banyak penyelewengan ditingkat distributor yang mengakibatkan sering terjadinya kelangkaan pupuk serta tugas dari BULOG yang masih banyak kekurangan secara umum pelaksanaan intensifikasi pertanian berhasil mencapai tujuan yaitu swasembada beras.

Dalam hal dampak intensifikasi mampu meningkatkan jumlah produksi padi serta tanaman pangan lainnya diseluruh Indonesia khususnya Jawa Timur. Secara nasional Jawa Timur merupakan penyumbang terbesar produksi tanaman pangan pertanian yaitu mencapai 40 % dan target swasembada beras pun terwujud pada tahun 1984. Sementara untuk kesejahteraan penduduk cukup terjamin, beras yang melimpah menjadikan harganya terjangkau. Sementara bagi para petani, swasembada tidak terlalu berdampak pada kenaikan taraf hidup mereka. Karena jumlah produksi yang besar sepadan dengan biaya produksi yang besar pula. Selain itu adanya permainan para tengkulak yang menjadikan harga jual dari petani sering jauh lebih rendah dari harga dasar yang ditetapkan pemerintah.

B. Saran

Penulis menyadari masih banyak kelemahan dalam karya tulis ini, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik yang membangun. Semoga karya ini dapat menjadi referensi bagi penulis selanjutnya yang mengangkat tema sejenis..

Daftar Pustaka

Arsip

Jawa Timur dalam Angka tahun 1982

Jawa Timur dalam Angka tahun 1983

Jawa Timur dalam Angka tahun 1984

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Buku I Seri A, B, C, D1, D2, D3 tahun 1984.

Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto, di Depan Sidang DPR.16 Agustus 1974/75 – 1978/79. Departemen Penerangan RI.

Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto, di Depan Sidang DPR.16 Agustus 1981. Departemen Penerangan RI.

Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto, di Depan Sidang DPR.15 Agustus 1984. Departemen Penerangan RI.

Buku

Aminudin Kasdi. 2005. *Kepurbakalaan Sunan Giri*. Surabaya : Unesa University Press

Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*, Surabaya: Unesa University Press

Arifin, Hutabarat. 1974. *Usaha Mengatasi Krisis Beras*. Jakarta : Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers

Bustanul, Arifin. 2007. *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian*. Jakarta : P.T Rajagrafindo Persada.

Bustanul, Arifin. 2005. *Ekonomi Kelembagaan Pangan*. Jakarta : LP3ES

Bustanul, Arifin. 1993. *Pangan Dalam Orde Baru*. Jakarta : Koperasi Jasa Informasi

Direktorat Publikasi Departemen Penerangan RI, *Usaha menuju swasembada beras*. 1980.

Ditjen Tanaman pangan, *Intensifikasi Pertanian Daerah Jawa Timur*. Tahun 1985.

Faisal, Kasryno. 1983. *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Bogor : Yayasan Obor Indonesia.

James, Scott. C. 1994. *Moral Ekonomi Petani Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta : LP3ES.

Jun, Wang Xiang. 2008. *Soeharto: Maafkan Saya*. Yogyakarta: Pustaka Radja.

Kahslan, A Tohir. 1983. *Seuntai Pengetahuan Tentang Usaha Tani Indonesia*. Jakarta : P.T Bina Aksara.

M.C. Ricklefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008*. Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta.

Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta : LP3ES.

Mudjadi, dkk. 1978. *Adat Istiadat Daerah Jawa Timur*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Koran

Jawa Pos. Jum'at, 5 Oktober 1984. *Pengadaan pangan lancar tidak ada tunggakan.*

Jawa Pos. 6 Maret 1983. *Biaya Pengadaan Gabah dan Beras di Jatim Sebesar Rp. 15,5 Milyar Untuk 500.000 Ton.*

Jawa Pos. 14 Maret 1983. *Produksi Pangan Naik Namun Polowijo Menurun.*

Jawa Pos. 25 Maret 1983. *Lebih Gesit Para Tengkulak.*

Jawa Pos. 4 Desember 1984. *Petani Dirangsang Untuk Bertanam Padi Gogo.*

Jawa Pos. 15 Desember 1984. *Ditetapkan, Harga Dasar, Kedele dan Beras.*

Jawa Pos. 17 Desember 1984. *Pemenuhan Kebutuhan Karbohidrat di Atas Rata-Rata Jatim.*

Jawa Pos. 19 Desember 1984. *Toleransi Pembelian Gabah dari Petani Tak Diberikan Lagi.*

Kompas. Rabu 2 Januari 1979. *Intensifikasi khusus, Produksi padi meningkat.*

Jurnal

Kartasasmita, Ginanjar. Pak Ibnoe: *Pejuang koperasi.*

Subagyo. *Pengembangan Nilai dan Tradisi Gotong Royong dalam Bingkai konservasi Nilai Budaya.* Universitas Negeri Semarang.

